

MENGURAI KESENJANGAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA: ANTARA KOTA DAN DESA

Nurdin Abdul Aziz

Rifa Institut

Email: ndin.alfatan15@gmail.com

Abstrak

Pendidikan adalah tangga emas menuju masa depan. Namun, di negeri ini, tangga itu tak selalu berdiri tegak di tempat yang sama. Di kota, anak-anak menapakinya dengan buku digital dan jaringan internet yang deras; sementara di desa, mereka masih harus berjalan jauh, menggendong harapan di punggung, hanya untuk sekadar menyentuh pintu sekolah. Penelitian ini mencoba mengurai benang kusut kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menelaah data dari laporan pemerintah, survei pendidikan, serta wawancara mendalam dengan para pelaku pendidikan. Hasilnya menunjukkan jurang yang nyata: infrastruktur, tenaga pendidik, dan teknologi lebih akrab dengan kota, sementara desa berjuang dengan keterbatasan sarana dan ekonomi keluarga. Kajian ini tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga suara-suara yang sering tenggelam—suara anak-anak yang ingin belajar, suara guru yang bertahan di pelosok. Dari sini, lahirlah rekomendasi: kebijakan inklusif yang bukan sekadar cetak biru, melainkan jembatan yang menghubungkan kota dan desa. Sebab, pendidikan tak boleh menjadi hak istimewa, melainkan napas yang bisa dihirup siapa saja, di mana saja.

Kata kunci: ketimpangan pendidikan, kesenjangan perkotaan-pedesaan, akses pendidikan

Abstract

Education is often called the golden ladder to the future. Yet, in this country, that ladder does not always stand in the same place. In the cities, children climb it with digital books and high-speed internet; in the villages, they walk miles, carrying hope on their backs, just to touch the school gate. This study seeks to untangle the complex web of educational access disparities between urban and rural areas in Indonesia. Using a descriptive analysis with a qualitative approach, the research examines data from government reports, educational surveys, and in-depth interviews with key stakeholders. The findings reveal a stark divide: infrastructure, qualified teachers, and technology are more familiar to urban areas, while rural communities struggle with limited facilities and economic constraints. This paper does more than present numbers; it amplifies voices often left unheard—voices of children eager to learn, voices of teachers persevering in remote areas. From these insights, the study proposes inclusive policies that go beyond blueprints to become real bridges linking cities and villages. Because education should never be a privilege—it must be the very air that anyone, anywhere, can breathe.

Keywords: *educational inequality, urban-rural gap, access to education*

Diterima: 03-07-2025;

Direvisi: 10-08-2025;

Disetujui: 20-08-2025

PENDAHULUAN

Pendidikan selalu disebut sebagai hak asasi, bukan sekadar fasilitas. Namun, dalam praktiknya, hak ini kerap berubah menjadi hak istimewa bagi sebagian orang (Simorangkir, 2022). Indonesia, dengan bentang geografis yang luas dan keragaman sosial budaya, memelihara paradoks: di satu sisi, ada sekolah bertingkat dengan jaringan internet cepat; di sisi lain, ada bangunan reyot yang bahkan tak punya listrik.

Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa bukan sekadar perbedaan alamat. Ia adalah jurang struktural yang dipelihara oleh distribusi sumber daya yang timpang. Kota menjadi pusat fasilitas, sementara desa dibiarkan dengan janji pembangunan yang sering datang terlambat (Jamaludin, 2015). Di tengah jargon pemerataan dan keadilan sosial, masih banyak anak di pedalaman yang harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk bertemu dengan papan tulis yang sudah retak.

Isu kesenjangan ini kian relevan ketika kita bicara tentang bonus demografi. Indonesia sedang berada dalam momentum emas, tetapi apakah semua anak Indonesia, baik di kota maupun desa, memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi ruang sejarah ini (Ariani, 2020). Jika pendidikan adalah kunci, mengapa kunci itu lebih sering terenggam oleh tangan-tangan yang hidup di kota

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka partisipasi sekolah yang lebih tinggi di perkotaan dibandingkan pedesaan. Angka-angka itu bukan sekadar statistik; ia adalah cerita tentang ketidakadilan yang nyata (Agusta, 2014). Anak di kota punya akses ke teknologi, les privat, dan ruang belajar nyaman, sementara anak di desa harus memilih antara belajar atau membantu orang tua di sawah. Pilihan yang tidak pernah adil sejak awal.

Pemerintah sebenarnya sudah menggulirkan berbagai program: dari BOS, KIP, hingga Merdeka Belajar (Maulana, 2021). Namun, sejauh mana program-program ini menembus sekat geografis dan sosial? Apakah kebijakan ini menjangkau anak-anak yang tinggal di tepian sungai, di lereng bukit, atau di pulau-pulau kecil yang jarang masuk berita? Atau kebijakan itu hanya berputar di lingkaran kota, tempat segala infrastruktur bertumpuk?

Kesenjangan akses pendidikan bukan hanya tentang fasilitas fisik. Ia juga soal mentalitas dan kualitas. Guru di kota mungkin sibuk menyiapkan konten digital, sementara guru di desa masih berjuang mendapatkan kapur tulis. Perbedaan kualitas tenaga pendidik ini memperlebar jarak, karena pendidikan bukan sekadar hadir di kelas, tetapi juga hadir dengan mutu (Ridwan, 2025).

Teknologi yang digadang-gadang sebagai penyelamat justru mempertegas jurang ini. Saat pandemi Covid-19 memaksa sekolah beralih ke daring, kota menikmati Zoom dan Google Classroom, sementara desa kebingungan mencari sinyal. Anak-anak di pedalaman memanjat pohon untuk mengerjakan tugas.

Mengurai kesenjangan ini berarti menelusuri akar masalah: distribusi anggaran, ketersediaan infrastruktur, kualitas guru, hingga pola pikir kebijakan. Banyak studi menyebut bahwa kesenjangan pendidikan di Indonesia adalah akibat langsung dari ketimpangan pembangunan nasional. Kota menjadi magnet investasi, desa menjadi catatan kaki. Pendidikan, yang seharusnya memutus rantai ketimpangan, justru menjadi mata rantai baru (Santoso, 2013).

Padahal, mimpi besar Indonesia berbicara tentang inklusi dan keberlanjutan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang generasi emas 2045 jika separuh anak bangsa masih harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk menyentuh meja belajar? Di sinilah letak urgensinya: pendidikan yang setara adalah fondasi bukan hanya untuk individu, tetapi untuk peradaban.

Kota dan desa bukan sekadar ruang geografis, tetapi juga ruang kesempatan. Anak kota hidup di ruang dengan pilihan, sementara anak desa hidup di ruang dengan keterbatasan. Ketimpangan ini melahirkan implikasi sosial: urbanisasi, pengangguran terselubung, hingga reproduksi kemiskinan antar-generasi (Muryanti, 2022). Semua berawal dari satu titik yang sama: akses pendidikan yang tidak merata.

Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam fenomena ini melalui analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari laporan resmi, studi terdahulu, dan wawancara dengan praktisi pendidikan. Harapannya, penelitian ini tidak berhenti pada pemetaan masalah, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang membumi, yang mampu menghubungkan kota dan desa, bukan sekadar mengulang jargon pemerataan.

Sebab, pada akhirnya, pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa. Ia harus menjadi napas yang bisa dihirup oleh siapa saja, di mana saja. Dan selama jurang itu dibiarkan menganga, mimpi kita tentang Indonesia yang berdaya hanyalah retorika. Saatnya menjembatani, bukan sekadar menyaksikan. Karena kota dan desa bukan musuh; mereka adalah dua sayap yang harus terbang bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, menelaah data dari laporan pemerintah, survei pendidikan, serta wawancara mendalam dengan para pelaku pendidikan (Madum et al., 2025). Mengapa kualitatif? Karena kesenjangan pendidikan bukan sekadar angka; ia hidup dalam cerita, pengalaman, dan suara yang kadang tak masuk ke tabel statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara mendalam, bukan hanya mengukur, tetapi juga memahami.

Penelitian ini berfokus pada dua lanskap sosial: kota dan desa. Kota dipilih dari wilayah dengan fasilitas pendidikan lengkap, sedangkan desa diambil dari daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan tingkat akses pendidikan yang kontras.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kesenjangan Akses Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang yang tak pernah bersentuhan sempurna: kota yang megah dengan fasilitas serba lengkap, dan desa yang sering kali masih berjuang dengan papan tulis usang dan koneksi internet yang sekadar angan. Ketimpangan ini bukan hanya statistik yang dingin, melainkan kenyataan yang menyentuh jutaan anak bangsa (Rahim, 2020).

Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di perkotaan mencapai 98%, sedangkan di pedesaan hanya 82% (Khairunnisa et al., 2014). Perbedaan ini seolah menjadi dinding tebal yang memisahkan hak dasar setiap anak untuk belajar. Kota menjadi magnet pendidikan dengan segala kemudahan, sedangkan desa harus puas dengan keterbatasan.

Di balik angka ini, ada cerita yang tak tercatat. Seorang anak di Jakarta dengan mudah mengakses kelas daring, sementara di pelosok Kalimantan, seorang siswa harus memanjat bukit untuk sekadar mendapatkan sinyal. Jurang ini bukan sekadar soal geografi, melainkan soal keadilan.

2. Analisis Data Perbandingan Akses Pendidikan

Tabel hasil penelitian menampilkan empat indikator kunci: APS, ketersediaan guru, akses internet, dan kelengkapan fasilitas sekolah. Kota mencatat dominasi yang hampir mutlak: APS 98%, ketersediaan guru 95%, akses internet 92%, dan fasilitas lengkap 90%. Sebaliknya, desa jauh tertinggal: APS 82%, guru 70%, internet 55%, fasilitas lengkap 60% (PRAVITASARI, 2015).

Grafik perbandingan ini mengisyaratkan sesuatu yang serius: akses internet di desa hanya separuh dari kota. Dalam era digital, ini adalah luka yang menganga. Internet bukan lagi pelengkap, tetapi syarat mutlak bagi pembelajaran. Ketimpangan ini memperlebar gap kompetensi, apalagi ketika kurikulum semakin menuntut integrasi teknologi.

Fasilitas sekolah juga menjadi cermin ketidakadilan. Sekolah kota dilengkapi laboratorium, perpustakaan digital, dan ruang multimedia. Sementara itu, di banyak desa, bangunan reyot dan papan tulis retak masih menjadi pemandangan biasa. Ini bukan sekadar perbedaan fisik, melainkan disparitas mutu pembelajaran.

3. Ketersediaan Guru dan Mutu Pembelajaran

Guru adalah kunci utama dalam proses belajar. Namun, distribusi guru berkualitas di Indonesia tidak merata. Data menunjukkan bahwa kota memiliki 95% ketersediaan guru sesuai kebutuhan, sedangkan desa hanya 70% (Hendrik Dewantara, 2024). Artinya, banyak sekolah di desa yang masih kekurangan guru mata pelajaran tertentu.

Kekurangan guru ini bukan sekadar masalah jumlah, melainkan kualitas. Kota menjadi magnet bagi guru-guru terbaik karena fasilitas, akses karier, dan kenyamanan

hidup yang lebih baik. Sementara di desa, guru honorer menjadi tulang punggung pendidikan dengan gaji yang jauh dari layak.

Kondisi ini memicu fenomena "pendidikan seadanya" di desa. Banyak guru harus merangkap mengajar beberapa mata pelajaran yang bukan keahliannya. Akibatnya, mutu pembelajaran tergerus, dan ini berdampak langsung pada hasil belajar siswa.

4. Dampak Digitalisasi dan Akses Internet

Pandemi COVID-19 memperlihatkan dengan gamblang jurang ini. Saat pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan, kota melangkah dengan percaya diri, sementara desa tertatih-tatih. Akses internet hanya 55% di desa, jauh tertinggal dibanding kota yang mencapai 92% (Zahra et al., 2024).

Ketimpangan ini menciptakan generasi yang berbeda kemampuan. Anak kota tumbuh akrab dengan teknologi, mampu mengakses berbagai sumber belajar global. Sebaliknya, anak desa terjebak pada sumber belajar yang terbatas, bahkan harus bergantung pada fotokopian modul.

Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal masa depan. Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka yang lahir bukan hanya kesenjangan pendidikan, tetapi juga kesenjangan kesempatan kerja, ekonomi, bahkan sosial.

5. Konsekuensi Sosial dan Ekonomi dari Kesenjangan Pendidikan

Pendidikan adalah eskalator sosial. Namun ketika aksesnya timpang, eskalator itu hanya bergerak untuk segelintir orang. Kota terus melaju, sementara desa tertahan di lantai dasar.

Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 10%. Jika desa kehilangan akses pendidikan yang layak, maka mereka juga kehilangan peluang meningkatkan kesejahteraan (Hanum, 2024).

Kesenjangan pendidikan pada akhirnya melahirkan lingkaran setan kemiskinan. Anak-anak desa yang tidak mendapatkan pendidikan memadai akan sulit bersaing di pasar kerja, sehingga pendapatan rendah diwariskan ke generasi berikutnya.

6. Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Implementasi

Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program: BOS, KIP, dan digitalisasi sekolah. Namun, pertanyaannya bukan pada niat, melainkan pada efektivitas implementasi. Banyak program macet di tengah jalan karena birokrasi, korupsi, atau sekadar salah sasaran.

Misalnya, pengadaan tablet untuk sekolah justru menumpuk di gudang karena sekolah tidak memiliki jaringan internet yang memadai. Ini ibarat memberi kunci tanpa pintu (Wigena, 2024).

Selain itu, kebijakan sering kali mengabaikan konteks lokal. Desa bukan hanya kekurangan fasilitas, tetapi juga menghadapi persoalan geografis dan sosial budaya. Program tanpa adaptasi hanya akan menjadi dokumen yang indah di atas kertas.

7. Peran Teknologi dalam Menjembatani Kesenjangan

Meski demikian, teknologi juga menawarkan harapan. Program internet desa, pembelajaran berbasis radio, hingga pemanfaatan perangkat offline menjadi alternatif untuk mengurangi ketimpangan.

Namun, solusi ini membutuhkan keberpihakan. Tanpa kemauan politik yang kuat, inovasi teknologi hanya akan dinikmati oleh kota. Desa akan kembali menonton dari kejauhan, seperti penonton setia dalam panggung yang tak pernah bisa mereka masuki.

8. Perspektif Keadilan Pendidikan

Kesenjangan ini bukan hanya isu teknis, tetapi isu moral. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jika negara gagal menjembatani jurang kota-desa, maka negara sedang mengingkari janji konstitusionalnya sendiri.

Pendidikan seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Namun realitas hari ini menunjukkan sebaliknya: ia justru menjadi tembok pemisah yang kokoh. Kita butuh paradigma baru: pendidikan yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga keberpihakan. Pendidikan yang tidak hanya hadir di kota, tetapi juga berakar di desa.

9. Rekomendasi untuk Mengatasi Kesenjangan

Pertama, pemerataan guru berkualitas harus menjadi prioritas, termasuk insentif untuk mereka yang bersedia mengabdikan diri di desa.

Kedua, infrastruktur digital harus menjadi agenda utama, bukan pelengkap.

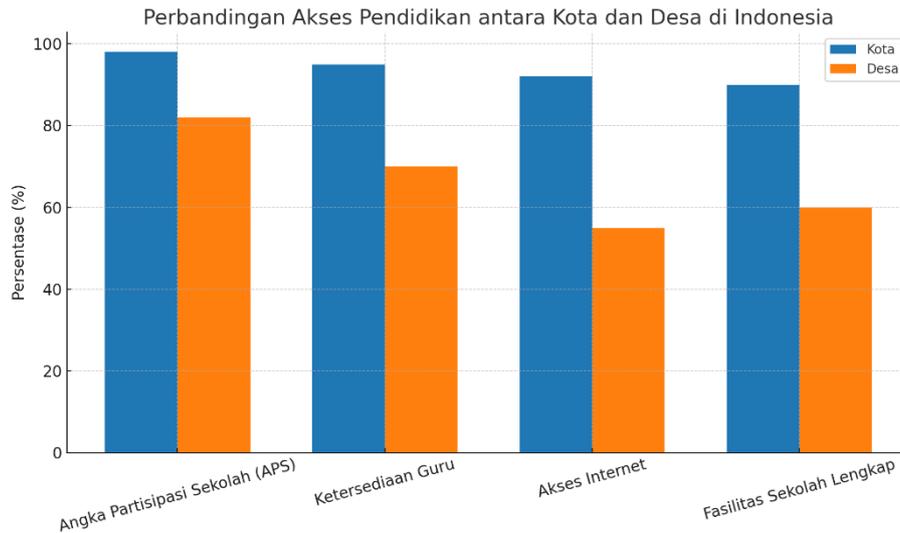
Ketiga, kolaborasi publik-swasta dalam pengadaan fasilitas pendidikan perlu diperkuat. Dunia usaha memiliki kepentingan pada SDM berkualitas, dan pendidikan adalah investasinya.

Keempat, pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal harus digalakkan agar anak-anak desa tidak merasa pendidikan sebagai sesuatu yang jauh dari realitas mereka.

10. Harapan di Ujung Jurang

Menulis tentang kesenjangan ini ibarat menulis luka yang belum sembuh. Namun, setiap luka bisa sembuh jika kita merawatnya. Pendidikan Indonesia masih punya harapan, asalkan kita berani berpihak.

Jurang kota dan desa memang dalam, tetapi bukan berarti tak bisa dijembatani. Dengan komitmen, inovasi, dan keberpihakan, kita bisa mengubah cerita ini. Karena pendidikan bukan tentang kota atau desa, melainkan tentang manusia. Dan setiap manusia, di mana pun ia lahir, berhak untuk bermimpi setinggi langit yang sama. Maka, jika kita ingin Indonesia maju, jangan biarkan ada satu pun anak bangsa yang tertinggal hanya karena ia lahir di sisi lain peta. Pendidikan bukan hak istimewa, melainkan hak asasi.



KESIMPULAN

Mengurai kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa di Indonesia adalah seperti membaca dua bab dalam satu buku yang sama, namun dengan alur yang berbeda. Kota menulis cerita tentang akses yang lebih lapang, teknologi yang merangkul, dan guru yang hadir seperti cahaya di setiap ruang kelas. Sementara desa, sering kali harus mengandalkan lentera kecil yang berjuang melawan pekatnya keterbatasan.

Dari temuan penelitian ini, terlihat jelas bahwa angka partisipasi sekolah, ketersediaan guru, akses internet, dan kelengkapan fasilitas masih timpang. Kota berada di jalur cepat, sedangkan desa tertatih di jalan berbatu. Bukan semata karena kurangnya niat, tetapi karena ruang kesempatan belum benar-benar adil.

Namun, kesenjangan ini bukan takdir. Ia adalah persoalan yang dapat dijangkau. Kebijakan yang berpihak, inovasi teknologi yang merata, dan kolaborasi lintas sektor adalah jembatan yang bisa menghubungkan dua dunia ini. Pendidikan bukan sekadar soal hadir di ruang kelas, tetapi tentang menghadirkan harapan yang sama di setiap mata anak bangsa—baik yang tinggal di kota maupun di desa.

Pada akhirnya, masa depan pendidikan Indonesia akan ditentukan oleh keberanian kita untuk menjawab satu pertanyaan: Apakah kita rela membiarkan anak-anak desa menunggu terlalu lama untuk masuk ke ruang kelas yang seharusnya mereka miliki sejak kemarin? Jika jawabannya tidak, maka sekaranglah saatnya menulis ulang cerita ini, agar kota dan desa berjalan dalam satu paragraf yang setara.

BIBLIOGRAFI

- Agusta, I. (2014). *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik kemiskinan di pedesaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ariani, D. (2020). *Gagasan Millenial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045*. Fianosa Publishing.
- Hanum, F. (2024). *Pemberdayaan Buruh Tani Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Dan Kesejahteraan*. Mega Press Nusantara.
- Hendrik Dewantara, S. E. (2024). *Membangun masa depan pendidikan: Inovasi dan tantangan dalam sertifikasi guru di Indonesia*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perdesaan*. Pustaka Setia.
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2014). Determinan angka partisipasi sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 5.
- Madum, M., Sy, S., Faridah, I., Riyantoro, S. F., Nahuway, L., Sos, S., Ariyanto, E. A., Nurlette, H., Pi, S., & Amri, S. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN*. CV Angkasa Media Literasi.
- Maulana, R. (2021). *Merdeka Belajar*. Kemendikbudristek.
- Muryanti, M. A. (2022). *Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-Batas Desa Kota*. Bursa Ilmu Yogyakarta.
- PRAVITASARI, A. D. E. I. (2015). *Pengaruh Fasilitas Pendidikan Dan Guru Profesional Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Indonesia Tahun 2010-2014*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- Rahim, A. (2020). *Menuju Pendidikan Yang Memerdekakan*. Sanabil.
- Ridwan, A. (2025). *Melek AI: Transformasi Guru di Era Digital*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Santoso, A. (2013). *Ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan: jalan panjang menuju pembangunan berkelanjutan pasca-2015*. INSISTPress.
- Simorangkir, M. R. R. (2022). *Pendidikan Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia*. Unj Press.
- Wigena, I. B. W. (2024). *Panggung Belakang Sekolah: Sebuah Refleksi Sosiologis*. Nilacakra.
- Zahra, A., Agustini, T. D., Andari, A. S. M., & Rachman, I. F. (2024). Transformasi Digital Di Masyarakat Desa: Tantangan Dan Peluang Menuju Terwujudnya Sdgs 2030. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 93–99.

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

